

PERAMPASAN TANAH DAN KONFLIK: KISAH PERLAWANAN *SEDULUR SIKEP*¹ Tri Chandra Aprianto*

Abstract: This paper draws how the people to make effort against land grabbing process in Kendeng mountain range, Pati, Central Java. The conflict not only into make effort the struggle forms of violence, but also come into fights on ideas level, because the are other efforts to bear down the other to make academic and cultural in order to pave land grabbing. This paper gets to know a consciousness of people to make effort against land grabbing. The consciousness of the people is an expression of everyday live such as politic behavior, economic idea, and cultural idea. In addition resistant community, especially Sudulur Sikep speak against land grabbing at the basis on their belief, and one of their conection is the one with the land.

Keywords: Land grabbing, industrialization, agrarian conflict, and Sedulur Sikep community.

Intisari: Tulisan ini menggambarkan bagaimana perlawanan masyarakat atas proses perampasan tanah berlangsung di Pegunungan Kendeng, Pati, Jawa Tengah. Konflik yang terjadi tidak saja berbentuk pertarungan kekerasan fisik, tapi juga terjadi pertarungan pada wilayah ide, karena terdapat upaya menundukkan yang lain dengan menggunakan legitimasi akademik dan kultural, dalam rangka memuluskan jalannya perampasan tanah. Tulisan ini berusaha memahami dan memperhitungkan kesadaran masyarakat di tingkat bawah dalam melakukan perlawanan. Kesadaran masyarakat yang maujud/mewujud dalam ekspresi keseharian baik yang bersifat perilaku politik, maupun cita-cita ekonomi dan bahkan angan-angan budaya. Dan perlawanan dari masyarakat, komunitas *Sedulur Sikep* berdasar atas keyakinan mereka, yang salah satunya adalah hubungan mereka dengan tanah.

Kata Kunci: Perampasan tanah, industrialisasi, konflik agraria, dan komunitas *Sedulur Sikep*.

A. Pengantar

Narasi pengelolaan sumber-sumber agraria di Indonesia masih berkuat pada masalah klasik “menyediakan tanah untuk pembangunan”. Narasi itu maujud dalam bentuk formulasi kebijakan yang memberi peluang bagi proses konsentrasi lahan pada satu kekuatan modal. Akibatnya, masyarakat lokal disingkirkan secara perlahan dari akses lahannya. Tanah tidak lagi “menyatakan” individu-individu yang tergabung dalam masyarakat. Tanah sudah menjadi milik institusi

yang didukung penyelenggara negara dalam rangka pelipatgandaan modal. Inilah yang disebut dengan perampasan tanah (*land grabbing*).² Kendati beberapa prakteknya terdapat unsur penyewaan atau ganti rugi (jual beli), namun itu tidak menghapus bahwa semua itu diperuntukkan pada akumulasi kapital.

Praktek *land grabbing* di Indonesia bukanlah merupakan hal yang baru. Banyak studi yang

¹ Tulisan ini adalah perbaikan dari makalah yang dipresentasikan pada seminar hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Kapuslitbang Depag di Hotel Melenium, Jakarta, 27 Desember 2012.

* Adalah Sejarawan Universitas Jember, aktivis dan penggiat studi agraria, sekarang sedang menjadi Mahasiswa S3 di FIB Universitas Indonesia.

² Istilah *land grabbing* muncul pertama kali dari laporan GRAIN, sebuah NOG dari Spanyol yang mendukung kelompok petani kecil. Dalam laporan tersebut, *land grabbing* merupakan tren global yang terkait dengan promosi bahan bakar nabati dan pangan untuk ekspor. Lihat Dwi Wulan Pujiriyani dkk, *Perampasan Tanah Global Pada Abad XXI*, dalam Tim Peneliti STPN, 2012, *Kebijakan, Konflik, dan Perjuangan Agraria Indonesia Awal Abad 21 (Hasil Penelitian Sistematis STPN, 2012)*, Yogyakarta: PPPM-STPN, hlm. 183.

telah menjelaskan praktek ini sejak era kolonialisme. Ironisnya praktek untuk mengkonsentrasikan tanah pada satu kepemilikan tidak saja (masih) menggunakan praktek kekerasan, tapi juga bujuk rayu, dan buaian unsur keyakinan. Sering kali, masyarakat yang menjadi korban malah mendapatkan stigma negatif baik secara hukum positif maupun norma kemasyarakatan. Sementara praktek perampasan tersebut menjadi sesuatu yang halal dan wajar. Praktek semacam ini menyebabkan tertutupnya akses dan asset penguasaan tanah oleh petani. Akibat selanjutnya adalah memperpanjang daftar konflik agraria di Indonesia.

Adalah Pegunungan Kendeng³ yang menjadi satu lahan yang ingin “dibebaskan” oleh kekuatan modal. Skemanya, Pegunungan Kendeng harus diubah dari kawasan lindung menjadi kawasan industri semen. Pegunungan ini menyimpan lebih dari 200 mata air dan beberapa sungai bawah tanah. Sekitar 45% kebutuhan air masyarakat Pati di topang oleh wilayah ini. Adanya upaya untuk merubah kawasan lindung menjadi kawasan industri inilah praktek dari skema *land grabbing* sedang diterapkan. Sejak tahun 2006 terjadilah konflik antara pihak masyarakat salah satunya adalah komunitas *sedulur sikep*⁴ yang melakukan penolakan dengan pihak yang memaksakan hadirnya industri semen.

³ Pegunungan Kendeng merupakan Kawasan Kars yaitu perbukitan batu gamping yang terletak di Kecamatan Sukolilo, Kayen, Tambakromo dan Brati (Kabupaten Pati), Grobogan, Tawangharjo, Wirosari, Ngaringan (Kabupaten Grobogan), dan Todanan (Kabupaten Blora). Menurut laporan Penelitian ASC (Acintyacunyata Speleological Club) pada tahun 2008, sebuah lembaga penelitian karst yang berkedudukan di Yogyakarta, menyatakan bahwa wilayah Pegunungan Kendeng termasuk dalam kawasan kars kelas I sehingga tidak boleh ditambang. Jika ditambang maka sumber air akan hilang, karena mata air tersebut berada di bawah permukaan.

⁴ *Sedulur Sikep* dikenal sebagai sekelompok masyarakat yang lelaku hidupnya berpatokan pada ajaran Samin Soerontiko (1890an). Samin Soerontiko ditangkap tahun

Hampir satu dekade belakangan keberadaan komunitas *Sedulur Sikep* muncul lagi dipermukaan, tapi bukan lagi soal “keunikannya” hidup sederhana di tengah budaya global.⁵ Isu yang menyeruak kepermukaan kali ini adalah penolakan *Sedulur Sikep* atas rencana industrialisasi di Pegunungan Kendeng, Pati, Jawa Tengah. Pada pertengahan 2006, PT Semen Gresik berencana berekspansi modal (sekitar 40% saham asing) ke Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pabrik semen itu akan dibangun di Kecamatan Sukolilo yang merupakan kawasan pertanian.

Demikianlah tulisan ini hendak menempatkan proses konflik agraria yang berbasis *land grabbing* terjadi tidak hanya bermakna perebutan tata kelola dan penataan tata ruang atas sumber-sumber agraria. Lebih jauh dari itu juga bermakna menata ulang hubungan kebudayaan antara manusia dengan tanah. Pertanyaan adalah mengapa *Sedulur Sikep* melakukan penolakan atas rencana dibangunnya industri di daerah Pegunungan Kendeng? Bagaimana bentuk perlawanan *Sedulur Sikep* dari setiap rezim yang ingin menundukkan mereka? Bagaimana proses negosiasi antara berbagai pihak yang sedang memperebutkan Pegunungan Kendeng? Kenda-ti pertanyaan dasarnya seperti itu, namun tulisan ini lebih ingin melakukan explanasi⁶ pema-

1907 selanjutnya dibuang ke Digul (Papua), kemudian dipindah ke Sawahlunto (Sumatera Barat) hingga *salin sandangan*. Wawancara Gunretno tanggal 12, 13 dan 14 Desember 2012. Komunitas ini awalnya hadir di Klopoduwur, Randublatung, Blora, kemudian berkembang ke daerah lain: Tapelan (Bojonegoro), Tlaga Anyar (Lamongan), Nginggil dan Klopoduwur (Blora), Kutuk (Kudus), Gunung Segara (Brebek) serta Kandangan dan Sukolilo (Pati). Lihat Harry J. Benda dan Lance Castles, *The Samin Movement*, dalam Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 125 (1969), No: 2, Leiden, hlm. 207-240.

⁵ Salah satunya yang paling mutakhir adalah tulisan, Moh Rosyid, *Samin Kudus: Bersahaja di Tengah Asketisme Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

⁶ Dalam ilmu sejarah eksplanasi atau suatu penjelasan itu berhubungan dengan hermeneutics dan verstehen,

haman, pemikiran dan keyakinan *Sedulur Sikep* dalam memandang setiap persoalan dari “dunia luar” yang hadir dalam diri mereka. Mengingat yang dihadapi oleh *Sedulur Sikep* adalah kepentingan kapital besar, dan dalam prakteknya juga menggunakan unsur moral keagamaan guna meminggirkan *Sedulur Sikep*.

Tulisan ini menyoroiti bagaimana praktek *land grabbing* dijalankan, Akan tetapi tetap penting memahami dan memperhitungkan kesadaran masyarakat di tingkat bawah dalam melakukan perlawanan, bukan sebaliknya. Kesadaran masyarakat yang maujud dalam ekspresi⁷ keseharian baik yang bersifat perilaku politik, maupun cita-cita ekonomi dan bahkan angan-angan budaya. Walaupun dalam realitas sosial yang terjadi sering menunjukkan proses marjinalisasi kesadaran masyarakat oleh *mainstream*. Kendati demikian, hal itu tidak serta merta dapat menghapus dan menafikan kehadiran serta bobot kesadaran yang telah dilakukan oleh masyarakat.⁸ Dengan

menafsirkan dan mengerti suatu peristiwa. Lihat pada Kuntowijoyo, 2008. *Penjelasan Sejarah (Historical Explanation)*, Yogyakarta: Tiara Wacana, hlm. 1 dan 10. Proses eksplanasi ini (bisa jadi) lebih mudah untuk ditampilkan, ketimbang melakukan analisis. Lebih dalam, analisis suatu proses sejarah seringkali tampak untuk menuntun dari, ketimbang menuju suatu kompleksitas pemahaman peristiwa sejarah. Pemahaman ini dapat dilihat pada Donald L. Donham, 1999. *History, Power, Ideology: Central Issues in Marxism and Antropology*, Berkeley and Los Angeles: University of California Press, hlm. 140.

⁷ Istilah ekspresi ini biasa disebut oleh kalangan ilmuwan sosial sebagai gerakan sosial, suatu tindakan sosial atau tindakan kolektif untuk melakukan perubahan dalam satu tatanan kehidupan sosial. Lihat A. Touraine, 1984. *The Return to The Actor*. Minneapolis. Istilah ini juga muncul di kalangan sosiolog Amerika pada tahun 1950-an. Eric Hobsbawn sejarawan Inggris yang pertama kali memakai istilah ini. Lihat pada Peter Burke, 2001. *Sejarah Dan Teori Sosial (Mestika Zed, Penerjemah)*, Jakarta: Yayasan Obor, hlm. 132-136.

⁸ Kehadiran *the other* dalam hal ini pabrik semen pada level tertentu merusak norma-norma budaya yang telah ada sebelumnya dan menetapkan ketentuan-ketentuannya sendiri. Eric Wolf, 1983. *Petani Suatu Tinjauan Antropologis*, Jakarta: YIIS dan CV. Rajawali, hlm. 186.

demikian guna memahami apa yang dilakukan oleh komunitas *Sedulur Sikep* harus juga melihat tindakan sosial mereka.⁹

B. Perebutan Makna Pegunungan Kendeng

Pembangunan dan industrialisasi merupakan mitos kemajuan suatu masyarakat yang “dipakai” dalam rangka memuluskan skema *land grabbing*. Kedua mitos tersebut diyakini dapat memberi nilai tambah bagi pemerintah daerah. Keyakinan tersebut berhimpitan dengan berlakunya era otonomi daerah di Indonesia (1998), yang awalnya sebagai *counter* terhadap sentralistik hierarkinya Orde Baru. Peletakkan batu pertama era otonomi daerah merupakan pintu masuk bagi komunikasi langsung antara kekuatan kapital besar (baik asing maupun dalam negeri) dengan pemerintah daerah. Sekaligus ini berkelindan dengan skema *land grabbing* di Indonesia.

Berbekal surat ijin yang dikeluarkan Kantor Pelayanan dan Perijinan Terpadu (Kayandu) Kabupaten Pati, PT Semen Gresik Tbk mulai tahun 2006 gencar melakukan sosialisasi rencana pembangunan pabrik semen. Adapun rencananya tampak tambangnya terletak di Kecamatan Sukolilo. Rencana investasi untuk kawasan industri semen ini sebesar 3,5 trilyun. Gagasan yang dikembangkan dalam sosialisasi tersebut adalah pentingnya keberadaan pabrik semen dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat yang itu lebih baik ketimbang bertani. Dengan mencon-

⁹ Tindakan sosial dalam bukan sekedar perilaku (*behavior*) reflektif yang sama sekali tidak melibatkan proses berpikir aktornya. Tindakan ini memiliki makna subyektif yang dilakukan secara sadar guna mencapai suatu tujuan tertentu. Tindakan ini akan dijalankan oleh aktornya bilamana tindakan tersebut kemudian dianggap memiliki makna subyektif (*subjective meaning*) bagi para aktor yang terlibat. Selain itu, tindakan ini akan sangat bergantung pada proses interpretasi dan identifikasi para aktornya atas situasi yang dihadapi. Lihat Antony Giddens, 1987. *Social Theory and Modern Sociology*, Stanford: Stanford University Press.

tohkan pendapatan daerah Kabupaten Tuban 90% disumbang oleh PT Semen Gresik dan PT Holcim.¹⁰

Ini adalah pemantik terjadinya situasi pro dan kontra di masyarakat dalam menyikapi kehadiran rencana industrialisasi di kawasan Pegunungan Kendeng. Masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam proses perencanaan hadirnya industrialisasi tersebut. Tiba-tiba saja sudah ada proses sosialisasi yang dibungkus dengan penjarangan aspirasi masyarakat. Anehnya Pemerintah Daerah (malah) melakukan pembiaran atas terjadinya situasi tersebut. Bahkan secara tegas Pemerintah Daerah mendukung praktek *land grabbing* tersebut, dengan menerbitkan Surat Pernyataan Bupati Nomor: 131/1814/2008 tentang kesesuaian lahan pengambilan bahan baku PT Semen Gresik dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pati. Sementara bagi masyarakat yang menolak itu bertenangan dengan RTRW Kabupaten Pati tahun 2001-2011.¹¹

Sementara itu penolakan *Sedulur Sikep* atas rencana industrialisasi tersebut tidak semata berdasar atas alasan legal formal di atas. Terdapat alasan keyakinan yang melatari penolakan tersebut. *Adam seneng nyandang, doyan mangan, dilakoni tata gauta, gebayah macung sing dumunung weke dewe*. Artinya *Sedulur Sikep* memiliki sistem dan tata cara tersendiri dalam mencari nafkah. Mereka sangat meyakini kerja keras untuk memenuhi sandang dan pangan, yang itu haruslah berasal dari sesuatu yang jelas *demununge* (asal-usulnya). *Demunung* merepresen-

tasikan konsep keyakinan tentang kemurnian yang mereka jalankan. Dari konsep ini pekerjaan mengolah tanah atau menjadi petani merupakan satu-satunya pekerjaan jelas asal-usulnya bagi mereka.¹²

Pegunungan Kendeng bagi *Sedulur Sikep* bukan hanya tanah yang semata-mata bermakna sebagai lahan. Tanah juga telah bermakna hadirnya sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Gunarti, orang sering menyebut dengan istilah Ibu Pertiwi untuk menyebut tanah yang ditempatinya. Ada makna ibu di sana, sebuah makna yang menghidupi seluruh makhluk. Oleh sebab itu sudah menjadi kewajiban bagi semua manusia, khususnya *Sedulur Sikep* untuk merawat dan melindungi.¹³ Bumi dianggap telah memberi mereka sumber hidup dan penghidupan. Untuk itu mereka wajib menyukurinya.¹⁴

Implikasi dari eksploitasi Pegunungan Kendeng, tidak hanya sebatas semakin menipisnya jumlah sumber mata air yang merupakan tumpuan kehidupan masyarakat. Pada level lain juga berdampak pada akan kehilangan kekayaan keanekaragaman hayati dan kerusakan alam. Dalam perspektif lain, ini merupakan tindakan pengabaian/pengusuran hak-hak masyarakat lokal serta marjinalisasi tatanan sosial dan budaya masyarakat, yang tidak pernah diperhitungkan sebagai ongkos ekonomi, ekologi, dan ongkos sosial-budaya yang harus dikorbankan untuk pembangunan serta mengabaikan kemaje-

¹⁰ Lihat pada Sri Hartati Samhadi dan Ahmad Arif, *Investasi Semen: Kami Juga Ingin Maju*, dalam Kompas Edisi 1 Agustus 2008.

¹¹ Husaini, 2008. *Fakta Empiris Atas Pro-Kontra Rencana Pembangunan Pabrik Semen: PT Semen Gresik Tbk di Kabupaten Pati, Jawa Tengah*, Makalah Tidak Diterbitkan, Yayasan Sheep Indonesia, hlm. 4.

¹² Wawancara Gunretno tanggal 12, 13, dan 14 Desember 2012.

¹³ Wawancara Gunarti tanggal 14 Desember 2012.

¹⁴ Dalam prakteknya, itu semua didasarkan pada nilai kejujuran dan kebenaran dalam konsep *pandom urip* (Petunjuk Hidup). Petunjuk hidup itu mencakup *angger-angger pratikel* (hukum tindak tanduk), *angger-angger pengucap* (hukum berbicara), serta *angger-angger lakonana* (hukum perihal apa saja yang perlu dijalankan). Wawancara Gunretno tanggal 12, 13, dan 14 Desember 2012.

mukan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹⁵

Mempertahankan keberadaan Pegunungan Kendeng dari acaman industrialisasi menurut Mbah Tarno,¹⁶ sesepuh *Sedulur Sikep*, bukan gagasan kolot dan tak berdasar. Malah, itu harus dilakukan demi menghargai sejarah. Selain itu, agar peradaban manusia di masa depan tak terancam runtuh. Bagi Mbah Tarno tidak ada larangan atau hukuman untuk mempertahankan lahan milik sendiri, termasuk oleh negara.¹⁷ Negara dalam konsepsi *Sedulur Sikep* adalah sebagai pelayan rakyatnya. *Adam ngongak sakjero ning negara*, arti bebasnya orang sikep itu mengerti secara mendalam tentang negara. *Sedulur Sikep iku dudu wonge negara*, *Sedulur Sikep* itu bukan orangnya pemerintah. Dengan demikian *Sedulur Sikep* itu tidak bisa menjadi pejabat di pemerintahan dan tidak punya cita-cita untuk menjadi pejabat negara. Hal itu dikarenakan, *Sedulur Sikep wis milih dadi juragan*, *Sedulur Sikep* sudah memilih menjadi juragan. Jabatan tertinggi dalam bernegara menurut konsepsi *Sedulur Sikep* ini adalah rakyat yang berprofesi sebagai petani. Karena merekalah yang menghidupi negara. Pejabat negara adalah pelayan dari rakyat, bukan penguasa.¹⁸

¹⁵ Lihat pada paper Erwin Dwi Kristianto, *Perlawanan Masyarakat Pegunungan Kendeng Utara*, makalah tidak diterbitkan.

¹⁶ <http://nasional.kompas.com/read/2012/04/16/02044683/Jujur.ala.Sedulur.Sikep>

¹⁷ Menurut keyakinan *Sedulur Sikep* tidak boleh menyalahi tatanan atau ajaran leluhur. Apabila terjadi penyimpangan atau bahkan melakukan pelanggaran dengan sengaja atas keberadaan ajaran leluhur, menurut keyakinan *Sedulur Sikep* dapat dipastikan akan terjadi sesuatu yang menimpa diri yang melanggar tersebut. *Sedulur Sikep* sering mengancam dengan kata *titenono* (perhatikan secara serius). Karenanya oleh sebagian kalangan juga disebut sebagai *wong peniten* (orang yang mengajak selalu waspada). Wawancara Gunretno tanggal 12, 13, dan 14 Desember 2012.

¹⁸ Wawancara dengan Gunretno tanggal 12, 13, dan 14 Desember 2012.

Akibat adanya perbedaan pemahaman antara yang memaksakan hadirnya investasi dan menolak, terjadilah polemik berkepanjangan. Berbagai alasan filosofis dari pihak *Sedulur Sikep* dan masyarakat yang menolak tidak dijadikan acuan oleh pihak yang memaksakan hadirnya industri semen. Pemaksaan kehendak tersebut mendapat perlawanan yang salah satunya adalah penghadangan rencana pengukuran lahan yang akan dijadikan tapak tambang. Penghadangan tersebut di desa Kedu Mulyo pada tanggal 22 Januari 2009. Dengan dukungan dari pihak aparat Polda Jateng yang menurunkan personilnya sebanyak 250 orang membubarkan dan menangkap 9 orang yang dianggap sebagai provokator yang merusak fasilitas mobil PT Semen Gresik Tbk.

Perlawanan dari masyarakat tidak berhenti akibat kejadian tersebut. Upaya untuk mempertahankan kelestarian Pegunungan Kendeng, komunitas *Sedulur Sikep* juga mengajak masyarakat petani lainnya yang hidupnya juga tergantung pada keberadaan Pegunungan Kendeng. Mereka membangun organisasi petani, Serikat Petani Pati (SPP). Selain itu mereka juga bekerja sama dengan kalangan LSM dan akademisi dalam rangka mengangkat isu-isu keadilan ekologi. Bahkan mereka juga melakukan perlawanan melalui jalur legal-formal. Hingga pada tahun 2010, Mahkamah Agung (MA) membatalkan dokumen perijinan yang dikeluarkan Kantor Pelayanan dan Perijinan Terpadu (Kayandu) Kabupaten Pati.¹⁹ Akibat batalnya rencana PT Semen Gresik Tbk, Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo berkomentar kalau Pemerintah Jawa Tengah telah dirugikan oleh orang-orang yang menolak adanya investasi.²⁰

¹⁹ Tampaknya berbeda pada era kolonial dan Orde Baru, perlawanan *Sedulur Sikep* lebih bersifat aktif, sementara sebelumnya cenderung pasif kendati tetap berprinsip dengan gerakan nir-kekerasannya akan tetapi pada kali ini.

²⁰ "Bibit Waluyo Geram, LSM Sontoloyo Bubarkan Proyek 5 Triliun," dalam *Koran Tempo*, edisi 25 Juli 2009.

C. Perebutan yang Tidak Imbang

Dengan dibatalkannya oleh MA bukan berarti skema *land grabbing* berhenti di situ. Kali ini bukan oleh PT Sahabat Mulia Sakti (PT SMS) mengajukan hal yang sama ke Pemerintah Daerah Pati. Perusahaan ini merupakan anak dari PT Indocement Tunggul Prakarsa. Rencananya tapak tambangnya tidak lagi di Kecamatan Sukolilo sebagaimana PT Semen Gresik Tbk, tapi wilayah Kecamatan Kayen dan Tambakromo. Persis sebelumnya, PT ini juga bergerak pada tambang pengolahan semen.

Kali ini, soliditas dan langkah-langkah perlawanan *Sedulur Sikep* di atas mulai menghadapi praktek-praktek penundukkan yang lebih kompleks. Praktek provokasi dan adu domba antar kelompok masyarakat lebih sering terjadi. Tuduhan terhadap *Sedulur Sikep* sebagai *wong mbangkang* (kaum pembangkang) direproduksi kembali. Sebagai kelompok masyarakat yang tidak mau dengan hadirnya kemajuan, *emoh modern* dan anti pembangunan.

Pada zaman kolonial, *Sedulur Sikep* mendapat stigma subvesif karena menolak membayar pajak dan mengikuti sistem pendidikan Belanda.²¹ Pada zaman Orde Baru, *Sedulur Sikep* dikenal sebagai komunitas yang tidak menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah formal dan masuknya mereka kedalam agama Budha, sebagai akibat pemaksaan pemerintah. Pada zaman Orde Baru mereka mendapat stigma anti pembangunan, anti kemajuan dan anti pemerintah.²² Kini *Sedulur Sikep*

²¹ Lihat Harry J. Benda dan Lance Castles, *The Samin Movement*, dalam Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 125 (1969), no: 2, Leiden, hlm. 207-240. Gerakan Samin adalah sebuah epos perjuangan rakyat dalam satu babak sejarah nasional, sebagai gerakan ratu adil penentang hegemoni kolonial. Lihat Sartono Kartodirdjo, 1984. *Ratu adil*, Jakarta: Sinar Harapan.

²² Pada titik ini yang terjadi adalah narasi kuasa menafikan keberadaan lokal, yang itu kemudian disalahtafsirkan. Lihat Muhammad Nurkhoiron, 2010. *Sedulur Sikep, Sedulur*

yang ada di Sukolilo, Pati mendapat stigma sebagai provokator oleh kekuatan kapital besar, karena menolak hadirnya pabrik semen.²³ Pandangan umum yang sengaja dibangun bahwa *Sedulur Sikep* adalah komunitas yang *ngeyelan* (suka mendebat), *wong mbangkang* (pembangkang), susah diatur, dan terbelakang, sehingga dikategorikan sebagai Komunitas Adat Terpencil (KAT), karenanya perlu pembinaan.²⁴

Kali ini upaya-upaya penolakan yang dilakukan oleh *Sedulur Sikep* mendapat perlawanan dari orang-orang yang mendukung industrialisasi. Perlawanan tersebut berupa tindak kekerasan dalam rangka menghentikan penolakan masyarakat tersebut. Setidaknya tercatat dua kali terjadi aksi kekerasan antara massa yang menolak kehadiran pabrik semen dengan massa yang diorganisasi oleh pihak investor.

Pertama, pada 20 April 2011, masyarakat yang menolak yang hendak melakukan demonstrasi di Kantor Pemda dan DPRD Pati, dihadang preman bayaran di depan Polsek Kayen, jalan raya Pati-Purwodadi, Km 26. Dalam aksi penghadangan tersebut sempat terjadi adu fisik antara dua belah pihak. Pihak kepolisian sendiri terkesan mendukung aksi penghadangan tersebut.

(Saudara) Yang Sering Disalahtafsirkan, Jakarta: Desantara.

²³ Stigma yang menimpa mereka kali ini berkelindan dengan nilai-nilai keagamaan *mainstream*, Islam. Komunitas *Sedulur Sikep* memiliki sejarah benturan dengan kelompok Islam. Khutbah-khutbah Samin Soerontiko dinilai oleh santri di pesisir utara Jawa Tengah sebagai hal yang menyesatkan. Lihat Suripan Sadi Hutomo, 1985. *Samin Soerontiko dan Ajaran-Ajarannya*, Basis, Februari, hlm. 3.

²⁴ Ridwan Al-Makassary, 2007. *Multikulturalisme: Review Teoritis Dan Beberapa Catatan Awal*, dalam Mashudi Noorsalim et.al (ed.), *Hak Minoritas, Multikulturalisme dan Dilema Negara Bangsa*, Jakarta: Yayasan Interseksi, hlm. 42. Lihat juga M Nurkhoiron, 2007. *Minoritasisasi dan Agenda Multikulturalisme di Indonesia: Sebuah Catatan Awal*, dalam Mashudi Noorsalim et.al (ed), *Hak Minoritas Multikulturalisme dan Dilema Negara Bangsa*, Jakarta:

Kedua, pada 1 Januari 2012, masyarakat yang menolak kehadiran pabrik semen melakukan pawai lingkungan hidup. Pawai ini dilakukan dalam rangka kampanye pentingnya ekologi terhadap generasi mendatang. Pawai lingkungan hidup tersebut dihadang dan sebagian peserta pawai dipukuli oleh preman-preman. Kejadian kekerasan itu terjadi di wilayah Desa Keben, Kecamatan Tambakromo.²⁵

Bersamaan dengan tindak kekerasan yang diterima oleh masyarakat yang melakukan penolakan tersebut PT SMS berupaya untuk melengkapi kelengkapan dokumen perijinan lingkungan. Perijinan ini merupakan legitimasi legal yang dibutuhkan oleh kaum pemodal untuk menjalankan praktek eksploitasinya. Komisi Penilai Amdal Kabupaten Pati menyelenggarakan sidang komisi pertama kali pada tanggal 30 Januari 2012. Adapun agenda dari sidang komisi tersebut adalah membahas Kerangka Acuan - Analisa Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) Rencana Pembangunan Pabrik Semen dan Pertambangan PT. SMS. Uniknya dalam persidangan ini penjagaan dilakukan sangat ketat. Ratusan polisi dari Polres Pati dihadirkan untuk mengamankan jalannya sidang tersebut. Selain itu untuk lebih memperkuat pengamanan sidang juga dihadirkan ratusan anggota Barisan Serbaguna (Banser) NU, selain masih terdapat banyak orang yang berpakaian preman.

Sementara itu masyarakat yang menolak rencana pembangunan pabrik semen tersebut berencana menghadiri sidang komisi. Masyarakat berbondong-bondong ingin menghadiri

proses persidangan tersebut. Mereka hadir dengan menggunakan kendaraan truk dari berbagai daerah di kawasan Pegunungan Kendeng. Sedikitnya 56 truk yang mengangkut mereka guna menuju Hotel Pati, tempat digelar sidangnya. Akan tetapi di depan Polsek Kayen, truk-truk tersebut dihadang oleh ratusan orang yang berseragam kaos berwarna putih-biru bertuliskan Pro Investasi. Akibat adanya penghadangan tersebut, bentrokkan fisik tidak terhindarkan. Kendati terdapat peristiwa tersebut, akhirnya puluhan truk yang memuat masyarakat yang menolak pabrik semen tersebut tiba juga di lokasi sidang. Mereka menggelar orasi menyampaikan aspirasi guna penolakan kehadiran pabrik semen.²⁶

Sementara itu pihak masyarakat sendiri mulai geram dengan tindakan kepala-kepala desa mereka yang dianggap hanya mementingkan dirinya sendiri. Kegeraman tersebut diwujudkan masyarakat guna mendatangi beberapa kepala desa yang setuju dengan kehadiran pabrik semen. Setidaknya ada 6 (enam) kepala desa yang didatangi. Para kepala desa itu dipaksa menandatangani pernyataan resmi untuk menolak rencana pendirian pabrik semen. Peristiwa itu terjadi di Desa Brati Kecamatan Kayen, Desa Keben, Larangan, Maitan, Karangawen dan Wukirsari Kecamatan Tambakromo pada pertengahan bulan Februari 2012.²⁷

Selain menghadapi berbagai tindak kekerasan *Sedulur Sikep* juga harus menghadapi upaya penundukan yang bersifat akademik, seperti seminar dan diskusi terbatas yang itu dilakukan oleh pihak investor. Hal ini secara sadar dilakukan, karena anggapan kaum pemodal *Sedulur Sikep* adalah orang yang tidak berpen-

Yayasan Interseksi. Bandingkan juga dengan AA GN Ari Dwipayana, "*Problematika Relasi Negara dan Desa*", makalah seminar "Relasi Politik Negara dan Desa" diselenggarakan Lingkar Pembaharuan Agraria dan Desa (KARSA), Yogyakarta, Desember 2007, hlm. 1-4.

²⁵ Wawancara Gunretno tanggal 12, 13, dan 14 Desember 2012.

²⁶ Cerita kronologis ini dituturkan oleh beberapa orang yang sedang berkumpul rumah Gunretno, pada tanggal 14 Desember 2012.

²⁷ *Ibid.*

didikan.²⁸ Salah satunya adalah kegiatan seminar tentang analisa dampak lingkungan di Hotel Pati, pertengahan Desember 2011. Kendati forum akademik, dan pihak *Sedulur Sikep* telah menunjukkan data akademik, namun pihak yang menginginkan hadirnya investasi memaknainya secara *pejorative*.

Bukan berhenti di situ, *Sedulur Sikep* juga harus dihadapkan dengan suatu kegiatan kesenian dari budaya *mainstream*. Pemerintah Daerah Pati mengadakan pentas malam kebudayaan yang dimeriahkan oleh pementasan Kyai Kanjeng di bawah Pimpinan Emha Ainun Najib, pada tanggal 14 Desember 2011. Pemda berharap dengan kegiatan ini dapat menjadi awal bagi komunikasi yang lebih baik untuk pihak yang menolak dengan pihak investor. Dan kedekatan Emha Ainun Najib dengan Gunretno tokoh *Sedulur Sikep* diharapkan dapat mencairkan ketegangan diantara keduanya. Kegiatan tersebut dihadiri dari kalangan Pemda, tokoh masyarakat, ulama, pihak investor, Frangky Welirang dan Gunretno sebagai pihak yang menolak hadirnya industri semen.²⁹

Akan tetapi kalau ditilik dari struktur kegiatannya, ini merupakan kegiatan yang berupaya menghadirkan budaya *adiluhung* guna menundukkan budaya *tanpa aji*. *Tanpa aji* karena prak-

²⁸ *Sedulur Sikep* dikenal sebagai komunitas yang enggan memasukkan anaknya dalam sekolah formal. Adapun alasannya menurut Gunarti, sekolah formal memberikan ajaran yang mempengaruhi mereka untuk pindah. Tidak saja pengaruh untuk mereka pindah keyakinan, tapi juga pindah terhadap pengetahuan dasar mereka. Bagi *Sedulur Sikep* ajaran ketauladanan orang tua itu sangat penting dan utama. Guru bagi *Sedulur Sikep* adalah orang yang sudah bisa menjaga omongan dan laku. Guru adalah *gunem kawruh*, omongan pengetahuan yang mendalam, yaitu memberi ujaran yang bermakna dalam kehidupan. Sehingga fungsinya juga memberi keteladanan hidup bagi generasi mendatang. Wawancara Gunarti 14 Desember 2012.

²⁹ Wawancara dengan Jumadi, tanggal 15 dan 16 Desember 2012.

tek budaya yang dijalankan oleh *Sedulur Sikep* adalah praktek budaya rakyat. Hal ini terwujud dalam pilihan bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa *ngoko*, bukan *kromo*.³⁰ Dengan demikian budaya *adiluhung* harus “mengajari” yang *tanpa aji*. Kyai Kanjeng adalah representasi dari nilai santri. Sementara *Sedulur Sikep* representasi sebagai sesuatu yang *liyan* (berbeda) dengan *mainstream*.

Kehadiran Gunretno dalam kegiatan tersebut memiliki arti yang sangat kompleks, tidak saja bagi Gunretno pribadi, tetapi juga bagi kalangan yang tidak setuju dengan adanya rencana industrialisasi di wilayah Pegunungan Kendeng. Selain itu makna kehadiran Gunretno dalam acara tersebut juga memiliki makna lain bagi pihak industri dan kalangan yang setuju dengan industri, juga pihak orang luar. Padahal secara denotatif (makna sesungguhnya) kehadiran Gunretno adalah sebagai orang yang diundang untuk menghadiri kegiatan pentas kesenian kyai kanjeng. Akan tetapi secara konotatif (makna tidak sesungguhnya) terdapat banyak tafsiran dan makna atas kehadiran tersebut. Situasinya adalah adanya upaya untuk menundukkan satu sama lain.

Adanya situasi penundukan tersebut dapat dilihat dari isi pidato dari pihak Pemerintah Kabupaten mengetengahkan pentingnya proses pembangunan di Kabupaten Pati. Pembangunan menjadi syarat bagi kemajuan Kota Pati, sebagai salah satu kota penting di Jawa Tengah. Untuk itu perlu hadirnya investor dan proses pembangunan yang itu bisa menyejahterakan masyarakat Pati. Tentu saja tafsir dibalik isi pidato tersebut adalah terdapat sekelompok orang Pati

³⁰ Untuk lebih detail soal penggunaan bahasa keseharian *Sedulur Sikep* bisa dilihat pada, Hari Bakti Mardikantoro, 2012. *Pilihan Bahasa Masyarakat Samin Dalam Ranah Keluarga*, Jurnal *Humanior*, volume 24, No. 3 Oktober, hlm. 345 – 357.

yang tidak mau dengan pembangunan. *Emoh* dengan proses kemajuan dan modernisasi. Representasi dari pembangunan, kemajuan dan modernisasi adalah hadirnya pabrik semen. Sementara kalangan yang menolak adalah kalangan yang anti pembangunan, anti kemajuan, anti modern dan terpenting mereka adalah petani. Petani selama ini telah menjadi simbol masyarakat yang berada pada stratifikasi paling rendah. Mereka adalah kalangan tradisional, *jumud* dengan keyakinannya dan menolak proses modernisasi. Hal itu tentu saja dengan mudah semua tuduhan itu dapat dilekatkan pada kalangan *Sedulur Sikep*.

Situasi penundukan semakin jelas dengan pidato selanjutnya yang disampaikan oleh wakil pemuka agama. Ia menyatakan kalau lantunan syair Kyai Kanjeng berisi pencerahan. Pencerahan terhadap keyakinan orang yang selama ini masih berada pada kegelapan. Dengan pencerahan orang akan dapat menerima mana hal yang baik dan yang buruk. Adanya pencerahan orang dapat menerima pemahaman baru, bukan lagi pemahaman lama.³¹

Upaya “penundukan” kebudayaan *mainstream* terhadap apa yang lokal dirasakan betul oleh pihak *Sedulur Sikep*. Kedua pidato sebelumnya dirasakan bukan hadir dalam pikiran yang bersifat denotatif, tapi dalam kerangka pikiran yang sarat konotatif. Kata-kata pembangunan, kemajuan, kesejahteraan, pencerahan dan lain-lain adalah kata-kata yang memiliki makna konotasi, bukan denotasi. Kata-kata tersebut memiliki konotasi menundukan, bukan konotasi yang mengajak dialog.

Menghadapi upaya penundukan tersebut, Gunretno manakala mendapat kesempatan menyampaikan gagasannya untuk kemajuan dan pembangunan Kota Pati. Gunretno lang-

sung menghadap ribuan penonton yang sedang menyaksikan pentas kesenian akhir tahun tersebut. Gunretno merasa berkepentingan dengan masyarakat luas, ketimbang dengan para elit yang duduk bersamanya di atas panggung. Ia menyampaikan pentingnya kelestarian alam Pegunungan Kendeng, ketimbang “kesejahteraan” yang ditawarkan oleh kaum pemodal, yang dibalik itu kehancuran ekologi. Penjelasan Gunretno sangat masuk akal kedalam alam pikir penonton. Sehingga dengan mudah penonton diajak yel-yel tentang kelestarian ketimbang hadirnya pabrik semen. Setelah itu Gunretno pamit kepada orang-orang yang ada di atas panggung, seraya minta maaf dan tetap mempertahankan *pareduluran*. Uniknyanya begitu Gunretno pamit dan meninggalkan panggung, sebagian besar penonton ikut meninggalkan acara tersebut.³²

D. Perebutkan Sakral

Mengingat stigma yang terus dilekatkan pada komunitas *Sedulur Sikep*, sehingga setiap kegiatan mereka terlebih dulu berada dalam kerangka yang *pejorative*. Apa yang dilakukan oleh *Sedulur Sikep* dan masyarakat disekitar Pegunungan Kendeng dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 67 tahun juga berada dalam kerangka ini. Oleh sebab itu pihak aparat keamanan, Kepolisian dan Kodim Pati melakukan berbagai upaya untuk menggagalkan kegiatan tersebut.

Setidaknya terdapat empat alasan dari pihak aparat keamanan untuk melakukan pelarangan kegiatan tersebut. *Pertama*, terdapat informasi bahwa kegiatan tersebut akan terjadi tindakan yang sifatnya subversif. *Kedua*, terdapat kesan akan ada pembangkangan sipil. *Ketiga*, bahwa upacara peringatan hari kemerdekaan itu sakral,

³¹ Wawancara dengan Jumadi, tanggal 15 dan 16 Desember 2012.

³² Hasil kompilasi hasil Wawancara Gunretno dan Jumadi.

tidak bisa dilakukan secara serampangan. *Keempat*, tempat upacara terjadi di Desa Brati itu terletak di lereng Pegunungan Kendeng, sehingga terkesan sembunyi-sembunyi dari keramaian.

Berdasar atas keempat alasan tersebut, pada tanggal 16 Agustus 2012, aparat keamanan mulai melakukan upaya untuk menggagalkan acara tersebut. Sepasukan tentara dari Kodim Pati mendatangi rumah Gunretno di Dukuh Bombong, Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Pati. Mereka datang di rumah Gunretno sejak pukul 13. Kursi tamu di ruang tamu Gunretno penuh dengan aparat keamanan. Belum lagi yang ada di luar rumahnya, juga ada beberapa aparat keamanan yang berjaga-jaga. Hampir setiap sudut rumah Gunretno difoto oleh aparat yang ada di ruang tamu, termasuk diri Gunretno, istri dan keluarganya, serta beberapa *Sedulur Sikep* yang mendampingi Gunretno juga difoto. Berbagai macam ancaman diterima Gunretno dari pihak Kodim Pati, jika tetap memaksakan diri melanjutkan kegiatan tersebut.

Dalam alam pikir aparat keamanan, kegiatan upacara peringatan Kemerdekaan RI adalah sakral. Sakral menurut perspektif militer. Dalam upacara yang dilakukan oleh rakyat di Pegunungan Kendeng itu tidak sesuai dengan Tatacara Upacara Militer (TUM). Sehingga upacara tersebut tidak bisa dilaksanakan. Apalagi rencana kegiatan yang disodorkan oleh Gunretno banyak berisi dengan tembang-tembang yang berbahasa Jawa. Dialog antara Gunretno dan pihak aparat dari Kodim itu berakhir jam 15, karena ia akan dilakukan gladi resik di tempat upacara.³³

Kemudian Gunretno beserta aparat keamanan tersebut berbondong-bondong ke tempat upacara di lapangan di Desa Brati, Kecamatan Kayen. Ternyata sesampai di tempat gladi resik, Gunretno sangat terkejut, karena aparat lebih banyak lagi di tempat gladi resik. Tidak hanya

hadir aparat dari Kodim Pati, tapi juga pihak kepolisian. Melihat banyaknya pihak keamanan tersebut, masyarakat sempat kebingungan mengingat kehadiran aparat keamanan sebagai sesuatu yang ganjil pada era reformasi. Akan tetapi mereka juga bangga, tidak ada rencana upacara peringatan hari kemerdekaan dijaga oleh aparat keamanan, kecuali di Istana Negara. Hal ini dirasakan sebagai hal yang berbeda dengan kegiatan di tempat lain yang tidak pernah ada penjagaan sedemikian ketat.

Sekembalinya dari gladi resik di tempat upacara, rumah Gunretno kembali dikepung oleh aparat dari Kodim. Hingga pukul 3 dini hari mereka berada di rumah Gunretno. Rupanya pihak aparat tetap dengan ketetapan meminta Gunretno membatalkan kegiatan upacara peringatan hari kemerdekaan ala rakyat tersebut.

Tepat tanggal 17 Agustus 2012, upacara puncak peringatan hari Kemerdekaan RI diperingati. Aparat keamanan baik dari pihak Kodim maupun dari Polres berjaga-jaga di tempat upacara. Tidak kurang dari 5.000 orang hadir dalam upacara ala rakyat tersebut. Mereka berusaha baris serapi mungkin. Komandan upacara, Pak Bambang menyiapkan upacara tersebut dengan khidmat. Pada saat pembawa bendera jalan menuju ke tiang bendera, diiringi dengan tembang *Ibu Pertiwi* karangan Ki Narto Sabdo (dalang terkenal pada tahun 1970-an). Sesampai di pinggir tiang bendera, Pak Gimin orang yang bertugas mengibarkan bendera Merah Putih maju ke depan. Sebelum menuju tiang untuk mengibarkan bendera dengan cara memanjat tiang bendera, Ia menyembah terlebih dulu peserta upacara, tiang bendera dan Bendera Merah Putih sendiri.

Setelah berhasil memanjat tiang bendera dan mengibarkan Bendera Merah Putih, rakyat bersorak yang kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Akhirnya upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI

³³ *Ibid.*

berjalan lancar, aparat keamanan yang berjaga juga merasakan keharuan tersendiri.³⁴ Begitu juga pada peringatan Hari Ibu tanggal 22 Desember 2012, Masyarakat Pegunungan Kendeng menggelar peringatan Hari Ibu. Mereka memaknai ibu sebagai para pejuang bagi masa depan anak-anaknya, untuk mempertahankan kelestarian alam dari ancaman industri tambang.³⁵

E. Kesimpulan

Sedulur Sikep melakukan penolakan atas upaya industrialisasi sebagai bagian dari skema *land grabbing* di Pegunungan Kendeng berdasarkan atas keyakinan mereka yang salah satunya adalah hubungan antara manusia dengan alam. Rencana industrialisasi di wilayah Pegunungan Kendeng tidak saja mengganggu pencarian nafkah, tapi juga mengganggu keyakinan yang telah dijalani oleh *Sedulur Sikep*. Skema ini dalam prakteknya tidak saja menggunakan narasi kekerasan, tapi juga akademik, kebudayaan dan keagamaan.

Wujud dari perlawanan yang dilakukan oleh *Sedulur Sikep* tetap seperti ajaran leluhur mereka, yaitu nir-kekerasan. Mereka lebih memilih jalan kebudayaan bersama masyarakat akar rumput, dengan memberi pemahaman, termasuk pemahaman bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kegiatan upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI dan peringatan Hari Ibu yang baru lalu merupakan bagian dari upaya penyadaran tersebut.

³⁴ Hasil diskusi dengan beberapa orang yang terlibat dalam upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-67, yang sedang berkunjung ke rumah Gunretno, tanggal 15 Desember 2012.

³⁵ Lihat pada *Kompas*, 23 Desember 2012, hlm. 21.

Daftar Pustaka

- Al-Makassary, Ridwan, 2007. *Multikulturalisme: Review Teoritis Dan Beberapa Catatan Awal*, dalam Mashudi Noorsalim et.all (ed.), Hak Minoritas, Multikulturalisme dan Dilema Negara Bangsa, Jakarta: Yayasan Interseksi.
- Benda, Harry J. dan Lance Castles, 1969. *The Samin Movement*, dalam *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 125 (1969), no: 2, Leiden, hal 207-240.
- Bhabha, Homi K., 1994. *Location On History*, London: Routledge.
- Burke, Peter, 2001. *Sejarah Dan Teori Sosial*, Mestika Zed, Penterjemah, Jakarta: Yayasan Obor.
- Donham, Donald L., 1999. *History, Power, Ideology: Central Issues in Marxism and Antropology*, Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
- Giddens, Antony, 1987. *Social Theory and Modern Sociology*, Stanford: Stanford University Press.
- Husaini, 2008. *Fakta Empiris Atas Pro-Kontra Rencana Pembangunan Pabrik Semen: PT Semen Gresik Tbk di Kabupaten Pati, Jawa Tengah*, Makalah Tidak Diterbitkan, Yayasan Sheep Indonesia.
- Hutomo, Suripan Sadi, 1985. *Samin Surosentiko dan Ajaran-Ajarannya*, Basis, Februari 1985. <http://nasional.kompas.com/read/2012/04/16/02044683/Jujur.ala.Sedulur.Sikep>
- Kartodirdjo, Sartono, 1984. *Ratu adil*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Kabupaten Pati dalam angka, BPS, 2012. *Kompas*, 23 Desember 2012, hlm 21.
- Koran Tempo* "Bibit Waluyo Geram, LSM Sontoloyo Bubarkan Proyek 5 Trilun," edisi 25 Juli 2009.
- Kuntowijoyo, 2008. *Penjelasan Sejarah (Historical Explanation)*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Laporan Penelitian dari tim ASC (*Acintyacunyata Speleological Club*) tahun 2008.
- Lloyd, Christopher, 1993. *The Structures of History*, London: Basil Blacwell.
- Mardikantoro, Hari Bakti, *Pilihan Bahasa Masyarakat Samin Dalam Ranah Keluarga*, Jurnal

- Humanior, volume 24, No. 3 Oktober 2012, hlm 345 – 357.
- Nurkhoiron, Muhammad, 2007. *Minoritisasi dan Agenda Multikulturalisme di Indonesia: Sebuah Catatan Awal*, dalam Mashudi Noorsalim et.al (ed), Hak Minoritas Multikulturalisme dan Dilema Negara Bangsa, Jakarta: Yayasan Interseksi.
- Nurkhoiron, Muhammad, 2010. *Sedulur Sikep, Sedulur (Saudara) Yang Sering Disalahtafsirkan*, Jakarta: Desantara.
- Pujiriyani, Dwi Wulan Pujiriyani, *Perampasan Tanah Global Pada Abad XXI*, dalam Tim Peneliti STPN, 2012. *Kebijakan, Konflik, dan Perjuangan Agraria Indonesia Awal Abad 21 (Hasil Penelitian Sistematis STPN, 2012)*, Yogyakarta: PPPM STPN-Press.
- Rosyid, Moh, 2008. Penulis buku Samin Kudus: *Bersahaja di Tengah Asketisme Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Samhadi, Sri Hartati dan Arif, Ahmad, 2008. *Investasi Semen: Kami Juga Ingin Maju*, dalam *Kompas* Edisi 1 Agustus 2008.
- Touraine, A., 1984. *The Return to The Actor*, Minneapolis.
- Weiringa, Saskia Eleonora, 1999. *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia*, Jakarta: Kalyanamitra dan Garba Budaya.
- Widodo, Amrih, *Samin In The New Order: The Politic of Encounter and Isolation*, hlm 278.
- Wolf, Eric, 1983. *Petani Suatu Tinjauan Antropologis*, Jakarta: YIIS dan CV. Rajawali.
- Wawancara dengan Gunretno, tanggal 12, 13 dan 14 Desember 2012.
- Wawancara dengan Gunarti, tanggal 14 Desember 2012.
- Wawancara dengan Jumadi, tanggal 15 dan 16 Desember 2012.
- Diskusi dengan beberapa orang *Sedulur Sikep* di rumah Gunretno tanggal 14 Desember 2012.
- Diskusi dengan beberapa orang yang terlibat dalam upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-67, yang sedang berkunjung ke rumah Gunretno, tanggal 15 Desember 2012.